



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Doi : 10.21043/politea.v3i2.8810

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Hagia Sophia dan Kebangkitan Politik Islam di Turki ?

Umi Qodarsasi, Melina Nurul Khofifah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

umiqodarsasi@iainkudus.ac.id, melinanurul365@gmail.com

Abstract

Hagia Sophia and the rise of Islamic politics in Turkey? Erdogan's decision to take over Hagia Sophia as a mosque has received any responses from various parties both those who supported and criticized it, from the government officials to the general public. Some of Muslim-majority countries generally support the Turkish government policy. However, domestically, the debate over this decision divide Turkish people into religious and secular parties. This paper aims to identify why the shifted of Hagia Sophia as a mosque has become a monumental event and how its impact toward the growing of Islamic movements in Turki.

Keywords : Hagia Sophia, Islamic Movements, Islamic Politics

Abstrak

Hagia Sophia dan kebangkitan politik Islam di Turki? Keputusan Erdogan untuk mengambil alih Hagia Sophia sebagai masjid mendapat tanggapan dari berbagai pihak baik yang mendukung maupun mengkritisi, mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat umum. Beberapa negara mayoritas Muslim umumnya mendukung kebijakan pemerintah Turki. Namun, di dalam negeri, perdebatan tentang keputusan ini memecah belah orang Turki menjadi partai agama dan sekuler. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa peralihan Hagia Sophia sebagai masjid menjadi peristiwa yang monumental dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan gerakan Islam di Turki.

Kata Kunci: Hagia Sophia, Gerakan Islam, Politik Islam

Pendahuluan

Hagia Sophia merupakan bangunan bersejarah yang menjadi saksi dinamika politik di Turki. Hagia Sophia yang dalam Bahasa Turki disebut Ayasophia telah melewati era lebih dari 15 abad dan menjadi saksi bisu berlangsungnya transisi banyak rezim yang menguasai Konstantinopel. Pada

zaman Kekaisaran Byzantium, Hagia Sophia merupakan sebuah gereja. Pasca Sultan Muhammad Al Faith menaklukkan Konstantinopel (Istanbul) dari kekuasaan Byzantium pada 1453, Hagia Sophia kemudian dialihfungsikan sebagai masjid. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia memperoleh sentuhan arsitektur Islam, mendirikan menara untuk melantunkan adzan, serta melengkapinya dengan madrasah, perpustakaan dan dapur umum. Fungsi Hagia Sophia sebagai masjid berlangsung selama 482 tahun (“Sejarah Hagia Sophia, Museum yang Dijadikan Masjid oleh Erdogan,” 2020). Pasca runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan berubahnya Turki menjadi Negara republik, Hagia Sophia kembali beralih fungsi. Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Hal ini seiring dengan reformasi yang dilakukan oleh Kemal Atatürk untuk menjadikan Turki sebagai Negara yang sekuler. Kemal Atatürk berpandangan bahwa Barat adalah contoh peradaban yang maju. Jika Turki ingin menjadi Negara yang mengalami kemajuan, maka otoritas keagamaan harus dihilangkan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat juga dalam menjalankan pemerintahan.

Presiden Erdogan meresmikan Hagia Sophia menjadi masjid bertepatan pada Hari Jum’at, 10 Juli 2020. Presiden Erdogan secara resmi menjadikan situs Hagia Sophia di Istanbul kembali menjadi masjid dan menyatakan terbuka untuk ibadah umat Islam setelah pengadilan tinggi membatalkan keputusan tahun 1934 yang menjadikan landmark agama tersebut sebagai museum. Keputusan ini mendapat respon dari berbagai pihak di dunia, mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat umum. Sebagian Negara yang mayoritas berpenduduk Muslim mendukung keputusan otoritas Turki mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Sejumlah organisasi Muslim seperti Uni Magrib Arab (The Magrib Arab Union), Ikhwanul Muslimin mendukung keputusan tersebut. Di samping dukungan, keputusan ini juga mendapat kritik dan kecaman baik secara nasional maupun internasional. Dari dalam negeri, perdebatan tentang keputusan ini menyentuh inti perpecahan antara pihak agama dan pihak sekuler di Turki. Kelompok-kelompok nasionalis-konservatif di Turki telah lama ingin berdoa di Hagia Sophia yang merupakan bagian dari warisan Kesultanan Ottoman. Sementara bagi kelompok sekuler, Hagia Sophia harus tetap menjadi museum sebagai symbol solidaritas Kristen dan Muslim (“Erdogan Resmi Jadikan Hagia Sophia sebagai Masjid,” 2020).

Kritik terhadap kebijakan Erdogan datang dari berbagai pihak, antara lain UNESCO, Yunani, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. UNESCO mengatakan Hagia Sophia adalah bagian dari area bersejarah Istanbul, sebuah properti yang tertulis dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO sebagai museum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa modifikasi tidak mempengaruhi nilai universal dari situs tersebut. Sementara itu, Yunani yang memiliki kedekatan geografis dan sejarah dengan Turki mengkritik Erdogan karena dianggap telah merenggangkan hubungan antara kedua Negara tersebut. Orang-orang Yunani melihat Hagia Sophia sebagai pusat agama Kristen Ortodoks. Ketika salat Jum’at pertama kali digelar di Hagia Sophia, lonceng gereja berdentang

menandakan berkabung di seluruh wilayah Yunani (“Turki dan Yunani Saling Sindir Usai Salat Jumat di Hagia Sophia,” 2020).

Uskup Agung Elpidophoros of America mengatakan keputusan itu bertentangan dengan visi pendiri Turki sekuler, Mustafa Kemal Atatürk yang memahami bahwa Hagia Sophia harus melayani semua rakyat Turki dan bahkan seluruh dunia. Sementara itu, Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa Hagia Sophia itu harus tetap menjadi museum yang berfungsi sebagai jembatan antara agama dan budaya. Menjawab kritik-kritik tersebut, Erdogan menyatakan bahwa pengalihfungsian Hagia Sophia sebagai masjid merupakan hak kedaulatan Turki. Erdogan juga menyatakan bahwa Hagia Sophia tetap terbuka untuk semua kalangan, baik penduduk lokal maupun turis asing, baik Muslim maupun non-Muslim (“Erdogan Resmi Jadikan Hagia Sophia sebagai Masjid,” 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki suatu permasalahan sosial dengan penyajian hasil akhir melalui pemaparan dan analisa fenomena dalam kerangka teoritis yang jelas (Silalahi, 2009). Objek dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah gerakan Islam di Turki dengan fokus pada kebijakan Erdogan mengalihfungsikan Hagia Sophia sebagai masjid. Teknis analisa yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah dan berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Hagia Sophia dan Kekhalifahan Turki Ustmani

Turki menjadi pusat peradaban sekaligus kekuasaan di hampir setengah dunia dengan wilayah kekuasaan antara benua Asia dan Eropa. Turki Usmani merupakan Negara Islam yang pernah menguasai peradaban dunia. Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Turki Usmani (Solikhun, 2013). Periode Dinasti Turki Usmani atau dikenal juga dengan Dinasti Ottoman berkuasa pada tahun 1300-1922 M. Kepemimpinan berlangsung kurang lebih enam abad. Awal periode keemasan diawali ketika paska Turki Ottoman berhasil menaklukkan ibukota Bizantium yaitu Kota Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukkan Konstantinopel ini mengukuhkan status Kekaisaran Turki Usmani sebagai kekuatan besar khususnya di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur (Murwati, 2009).

Masa kebesaran kerajaan Turki Usmani juga dicapai pada masa kesultanan Muhammad II yang lebih dikenal dengan gelar *al-Fath*, gelar *al-fath* ini diperoleh karena Sultan *al-Fath* ini diperoleh karena Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tanggal 28 Mei 1453.

Dengan jatuhnya Konstantinopel beralih menjadi Istanbul. Wilayah kekuasaan kerajaan Usmani di era pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni meliputi tiga benua, yaitu Benua Afrika meliputi Mesir, Libia, Tunis serta Aljazair, benua Asia, meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Suria, Hijaz serta Yaman. dan benua Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania (Nofrianti & Muslim, 2019). Pasca penaklukan Konstantinopel, Dinasti Usmani mengubah sebuah bangunan beserajah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid dan menambahkan empat menara di bagian luar. Hagia Sophia sebelumnya merupakan sebuah gereja yang dibangun oleh Kaisar Bizantium. Ikon-ikon Kristen kemudian ditutup dengan mosaik emas hiasan dengan panel kaligrafi Arab. Hagia Sophia kemudian menjadi jantung kerajaan Muslim Ottoman. Pada masa ini, Hagia lebih dikenal sebagai Aya Sophia oleh Muslim Turki (“Hagia Sophia : Salat Jum’at Pertama Setelah 86 Tahun,” 2020).

Turki Usmani berhasil membentuk suatu kekuatan besar dengan masyarakat yang multi etnis dan multi religi. Kebebasan dan otonomi kultural yang diberikan imperium kepada rakyatnya yang non muslim merupakan suatu bukti bahwa sistem kekhilafahan dengan konsep Islam telah menunjukkan adanya toleransi dan keadilan. Dalam kekhilafahan Turki Usmani, Sultan mempunyai kedudukan sekaligus sebagai Khalifah. Sebagai Sultan dia memegang fungsi sebagai pemimpin Negara, sementara sebagai khalifah dia memegang fungsi sebagai pemimpin agama. Kekhilafahan Turki Usmani didukung oleh dua kekuatan. Pertama adalah kekuatan ulama (*Syaikhul Islam*) sebagai pemegang hukum syari’ah. Dan yang kedua adalah kekuatan tentara yang dikenal dengan sebutan *Janissari* (Isputaminingsih, 2014).

Dalam sejarah, Turki Usmani telah mencapai kemajuan di beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan dan kemiliteran, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta bidang keagamaan. Dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran, Kekhalifahan Turki membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan Sultan yang juga berperan sebagai Khalifah. Sultan dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi Gubernur. Gubernur kemudian mengepalai Daerah Tingkat I dan membawahi Bupati. Dalam bidang militer, Khalifah Turki Usmani mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut sebagai Janissari (Nofrianti & Muslim, 2019).

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, Kekhalifahan Turki Usmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Byzantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata karma dalam Istana Sultan. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran diserap dari Byzantium. Mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil dari Budaya Arab. Sementara dalam bidang keagamaan, ajaran-ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan. Para mufti menjadi pejabat tinggi dalam urusan agama sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat (Nofrianti & Muslim, 2019).

Setelah berkuasa sekitar 6 Abad, Dinasti Turki Usmani mengalami masa-masa keruntuhan. Berakhirnya perang dunia I membuat Dinasti Turki Usmani semakin terpuruk. Dinasti Turki Usmani kehilangan banyak teritori penting di Timur Tengah. Timur Tengah kemudian dikuasai oleh dua kekuatan besar, yaitu Imperium Britania Raya dan Perancis. Sementara itu perpecahan juga terjadi di dalam tubuh internal Dinasti Turki Usmani dengan adanya gerakan nasionalis yang ingin menghapuskan dinasti (Hasan, 2018). Pasca runtuhnya Dinasti Turki Usmani, Turki diambil alih oleh kelompok nasionalis di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Kemal melakukan perubahan besar-besaran dengan mencabut Islam dari kehidupan bernegara di Turki. Bercermin dari Barat, kemajuan Turki dapat terwujud jika dominasi agama dihilangkan dari kehidupan publik, untuk itu Kemal berupaya menjadikan sekularisme dan nasionalisme sebagai pijakan dalam menuju Turki yang lebih modern dan maju.

Gagasan Sekularisme Mustafa Kemal Atatürk

Pasca runtuhnya Kekhalifahan Turki Usmani, Mustafa Kemal Atatürk muncul dengan gagasan pembaharuan, yaitu dengan menjadikan Turki sebagai Negara Negara nasional yang modern. Kemal melihat bahwa pemerintahan Turki Usmani bukan tipe ideal pemerintahan yang modern. Sultan mempunyai kekuasaan yang despotik, absolut dan cenderung anti pembaruan. Tidak ada hukum yang membatasi kekuasaan sultan, dan tidak ada parlemen yang dapat mengontrol kekuasaan. Sementara itu, dalam relasi antara Turki dengan Negara-negara Barat (sekutu), Sultan tidak berdaya menghadapi kekuatan Barat yang sedikit demi sedikit menguasai wilayah Turki Usmani (Iqbal & Nasution, 2015).

Dalam pemikiran Kemal Atatürk, kepemimpinan Turki Usmani tidak bisa maju karena terdapat keterkaitan yang erat antara Negara dan Islam. Pemimpin Turki Usmani mempunyai dua gelar sekaligus, yaitu gelar Khalifah untuk kekuasaan agama, dan gelar Sultan untuk kekuatan politik. Kemal membandingkan kondisi ini dengan Barat, di mana Barat yang berani meninggalkan agama dari arena politik dan melakukan sekularisasi sehingga melahirkan peradaban yang tinggi. Maka jika Turki ingin menjadi maju dan modern, mereka harus mengikuti langkah Barat dengan melakukan sekularisasi antara Islam dan Negara (Berkes, 1963).

Gerakan Pembaharuan Kemal Atatürk atau yang dikenal dengan kemalisme mendefinisikan gerakannya sebagai antagonism obsesif terhadap rezim kuno, dalam hal ini Kesultanan Turki dan masyarakat muslim. Untuk itu mereka mengusung perubahan-perubahan secara revolusioner dan radikal dalam mewujudkan Negara yang modern, sekuler, dan nasionalis. Sekularisme Kemal diwujudkan sebagai symbol kemajuan dan peradaban, serta merupakan antitesis dari keterbelakangan. Kemalisme berusaha menciptakan Islam yang ramah terhadap sekularisme yang dikenal dengan sebutan Islam yang tercerahkan. Konsep “keamanan sekularisme” dijalankan oleh Kemal, yang berarti bahwa setiap penolakan dan tantangan terhadap sekularisme berarti terbelakang, irasional, dan melakukan upaya pecah belah (Yavuz, 2003).

“Keamanan Sekularisme” ini memiliki beberapa konsekuensi, yaitu : 1) mencegah debat publik yang terbuka dan partisipatif tentang pembentukan kontrak sosial dengan memaksakan definisi masyarakat ideal oleh Kemalists, yaitu ssekularisasi dan westernisasi; 2) tidak mentolerir artikulasi dari identitas atau gaya hidup yang berbeda dalam domain publik karena akan merusak visi Kemalists tentang masyarakat yang ideal; 3) menjadikan politik sebagai alat untuk mewujudkan tujuan Kemalists. Dengan begitu, partisipasi politik hanya berlaku bagi mereka yang menganut tujuan Kemalists dan terus berusaha mempromosikannya. Efek secara keseluruhan adalah mendelegitimasi perbedaan pendapat dan oposisi di ruang publik. Politik, oleh karena itu, adalah "administrasi" sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Kemalists. Sementara tugas utama militer adalah untuk mengawasi dan memantau ruang publik dan menghukum mereka yang tidak bertindak sesuai dengan prinsip Kemalists. Bahkan Parlemen Turki tidak bebas menentukan undang-undang melainkan lembaga yang mengeluarkan undang-undang yang sesuai pandangan pengawal utama Kemalists, yaitu *National Security Council* (NSC) (Yavuz, 2003).

Untuk merealisasikan gagasan sekularisme, langkah awal yang dilakukan adalah menghapus jabatan Sultan sebagai pemegang kekuasaan politik pada tahun 1922 dan telah mendapat persetujuan dari Majelis Nasional Agung. Kemudian pada Oktober 1923, Majelis Nasional Agung memutuskan Turki sebagai Negara republik. Selanjutnya pada 3 Maret 1924 terjadi penghapusan khilafah. Inilah akhir dari kekhalifahan Turki Usmani yang pernah Berjaya sejak tahun 1300 M, digantikan dengan republic Turki Modern di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk. Pada saat yang sama, Majelis Nasional Agung juga menghapus Kementerian Syariah dan Awqah dan menyatukan sistem pendidikan di bawah Kementerian pendidikan. Kemal juga menghapus jabatan *Syaikh al-Islam* yang merupakan pembantu utama Khalifah Usmani dalam masalah-masalah agama. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama juga ditutup (Iqbal & Nasution, 2015).

Pada tahun 1925 Kemal menutup tarekat. Pada tahun 1926, Komite ahli hukum mengganti Undang-undang Syariah dengan Undang-undang sipil Swiss. Undang-undang ini mengatur antara lain menerapkan monogami; melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan pernikahan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persamaan hak ini, maka hukum waris Islam juga turut dihapuskan. Undang-undang sipil ini juga memberi kebebasan bagi pernikahan beda agama. Pada tahun yang sama, Kemal mengganti kalender Hijriah dengan Masehi. Kemudian menghapus Islam sebagai agama Negara, menetapkan sumpah sekuler bagi anggota Majelis Nasional Agung dan menghapus tugas parlemen dalam menerapkan hukum Islam (1928).

Reformasi agama lainnya yang dilakukan oleh kemalists adalah mengganti khutbah dalam Bahasa Turki pada awal tahun 1922. Dalam pidatonya pada kesempatan pembukaan Sidang Agung Nasional pada 1 Maret 1922, katanya masjid sebagai pusat nutrisi spiritual bagi masyarakat, dan tegasnya pentingnya melafalkan khotbah dalam bahasa yang dapat dipahami orang-orang. Setidaknya tujuh terjemahan Alquran diterbitkan¹⁸ di bawah judulnya Kur'an-ı Kerim Tercümesi

atau *Terceme-i Şerife* dari tahun 1924 hingga 1927. Namun demikian, tidak satupun dari terjemahan ini secara resmi diakui oleh *Diroctorate of Religious Affairs* (DRA). Untuk memperbaiki kekurangan terjemahan Alquran yang sesuai, Pemerintah menugaskan Mehmet Âkif, penyair lagu kebangsaan, untuk mempersiapkan terjemahan baru. Mehmet Âkif menulisnya di Mesir dimana dia tinggal sebagai seorang pengasingan sebagai reaksi terhadap kebijakan sekuler rezim Kemalis. Mehmet Âkif dipilih untuk proyek penerjemahan karena pengetahuannya dari kedua bahasa tersebut, serta bahasa Islam, dipercaya. Namun, Mehmet Âkif mengundurkan diri dari proyek ini pada tahun 1926, karena mencurigai terjemahannya akan digunakan dalam ibadah salat. Proyek Turkifikasi Ritual Islam mendapat dorongan pada tahun 1932, ini waktu dengan inisiatif langsung dari Mustafa Kemal. Turkifikasi adzan adalah bagian dari proyek Kemalis untuk membuat Turki mendominasi semuanya bidang budaya termasuk agama dan untuk memperpanjang Turkifikasi bidang sejarah dan bahasa hingga bidang agama (Azak, 2010).

Kemal tidak menginginkan agama masuk ke dalam wilayah publik. Pranata sosial yang berbau agama digantikan dengan pranata sekuler. Negara harus benar-benar netral dari agama (Iqbal & Nasution, 2015). Sekularisasi dan modernisasi yang diusung oleh Kemal Ataturk ini menurut uraian Bryan S. Turner merupakan suatu bentuk pemaksaan dari rezim, bukan sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses-proses modernisasi seperti di Negara-negara Eropa. Sekularisasi dan modernisasi yang diusung oleh Kemal Ataturk ini menurut uraian Bryan S. Turner merupakan suatu bentuk pemaksaan dari rezim, bukan sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses-proses modernisasi seperti di Negara-negara Eropa (Mustofa, 2016).

Gagasan Islamisme Reccep Tayyip Erdogan

Runtuhnya kekuasaan Mustafa Kemal Ataturk menjadi momentum bagi kebangkitan politik Islam di Turki. Dimulai dari gerakan tokoh Islamisme Turki Necmetin Erbakan yang memenangkan pemilu pada tahun 1996. Namun pada satu tahun kepemimpinannya, pemerintahan Erbakan dibubarkan oleh militer Turki yang tidak ingin Erbakan mengembangkan pandangan-pandangan Islamisnya. Di sinilah terjadi ketegangan nasionalis-Islamis yang mewarnai kultur politik Turki. Langkah Islamisme Erbakan kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Reccep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul yang mendirikan Partai Keadilan Pembangunan/ *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) pada 14 Agustus 2001. Pendirian partai ini mendapat apresiasi dari masyarakat Turki, terlihat dari keberhasilan AKP dalam memenangkan pemilihan umum pada tahun 2002. Dengan kemenangan ini, AKP menjadi partai yang berkuasa dengan mendapatkan 367 dari total 550 kursi di parlemen (Junaidi, 2016).

Kemenangan AKP terulang lagi pada pemilihan umum tahun 2007. Abdullah Gul terpilih sebagai presiden, sementara Erdogan memenangkan jabatan strategis sebagai perdana menteri. Di antara kebijakan yang dibuat adalah mengembalikan pengajaran Al-Qur'an dan hadist di sekolah-sekolah negeri, kebebasan berhijab di kampus-kampus, larangan minuman keras, dukungan

terhadap perjuangan Palestina, dan lain-lain. Performa kepemimpinan AKP dengan program-program Islamisasinya serta kemajuan dalam bidang ekonomi menjadikan dukungan terhadap partai ini terus meningkat. Pada tahun 2014, AKP kembali memenangkan Pemilu dan mengantarkan Erdogan sebagai Presiden (Junaidi, 2016).

Di dalam dinamika politik global saat ini, Turki mendapat atensi dari negara-negara dunia atas terobosan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan. Bahkan, Turki menjadi Negara yang cukup diperhitungkan dalam politik internasional dan geopolitik kawasan. Terutama sejak Turki berada di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan sejak tahun 2012. Erdogan menjadi simbol resistensi terhadap narasi tatanan dunia yang dikendalikan oleh Negara maju. Gaya kepemimpinan Erdogan menunjukkan keberanian dalam mengambil sikap atau kebijakan yang tidak populis di tengah dominasi Negara maju. Walaupun Erdogan mendapat tekanan internasional yang meragukan kualitas demokrasi Turki pasca gagalnya kudeta pada tahun 2017, Turki melalui Presiden Erdogan menjadi harapan baru kebangkitan peradaban Islam (Puspitarini, 2020).

Gerakan sekularisme yang diusung oleh Mustafa Kemal Atatürk tidak serta merta mencabut akar Islam dalam kehidupan masyarakat Turki. Sebuah survey yang didanai oleh *The Turkish Economic and Social Studies Foundation* (TESEV) menunjukkan adanya peningkatan yang mencolok dalam pengertian identitas Muslim sebagai bagian dari identitas masyarakat Turki. Survey dilakukan melalui wawancara terhadap 1500 responden yang tersebar di 23 propinsi. Hasil dari survey ini menunjukkan bahwa masyarakat Turki terbagi menjadi dua secara sosiopolitik, yaitu sepertiga dari mereka adalah kelompok sekular, sementara dua per tiga lainnya adalah kelompok agamis. Kelompok sekular kemudian terbagi lagi menjadi beberapa ideology, yaitu 10 persen masyarakat berideologi ultrasekuler, sangat nasionalis, anti Eropa, dan anti Amerika Serikat. Sementara 20 persen lainnya merupakan masyarakat yang demokratis dan khawatir jika sekularisme di Turki menghilang maka akan timbul pengikisan secara bertahap terhadap hak-hak sekuler bahkan akan menjadi seperti Republik Islam Iran. Sementara dari kelompok agamis, 10 persen di antaranya mendukung Negara berdasarkan pada hukum Islam, 50-60 persennya merupakan kelompok yang konservatif namun tetap setuju terhadap modernisasi. Mereka ini mewakili aspirasi masyarakat kelas menengah (Rabasa & Larrabee, 2008). Pada dasarnya mayoritas masyarakat Turki beragama Islam. 99,8% masyarakat Turki mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim. 0,2% lainnya merupakan komunitas Nasrani dan Yahudi. Muslim Turki terdiri dari beberapa sekte. Sebagian besar beraliran Sunni, kemudian diikuti dengan Sekte Alevi yang merupakan kombinasi antara sekte sunni, syiah, dan kepercayaan pra-Islam (Robinson, 2011).

Sebagian besar dukungan reformasi sekularisme Kemalis cenderung ada di wilayah perkotaan, banyak wilayah pedesaan yang tidak tersentuh oleh reformasi sekularisme ini. Pada tahun 1950-an banyak masyarakat Turki pedesaan yang hidup terisolir dan menjalankan kehidupannya secara tradisional, sementara masyarakat kota sudah banyak terpengaruh oleh ideologi sekularisme ini.

Dalam kondisi ini masyarakat Turki terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu masyarakat elit perkotaan yang hidup modern dan sekuler, serta penduduk desa pinggiran yang hidup tradisional dan berpegang teguh pada agama. Masyarakat pinggiran ini mempunyai jumlah yang lebih besar. Islam masih mengakar kuat dalam masyarakat ini meskipun pemerintah pusat telah mengubah infrastruktur Negara dengan berbasis ideology sekularisme (Rabasa & Larrabee, 2008).

Kebijakan Islamisme Erdogan tidak hanya mendatangkan dukungan saja, tetapi juga terjadi penentangan terutama dari kalangan nasionalis dan sekularis. Meningkatnya Islamisme di Turki sebagian besar merupakan respon terhadap faktor-faktor internal, khususnya demokratisasi dan transformasi sosial ekonomi masyarakat Turki. Keberhasilan AKP yang mempunyai akar Islam dalam dua pemilu terakhir di Turki menunjukkan adanya kekuatan Islam yang tumbuh. Dalam pemilihan yang diselenggarakan pada November 2002, AKP memenangkan sebanyak 34 persen suara, yang memungkinkan partai ini dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Kemudian pada pemilihan yang diselenggarakan di Bulan Juli tahun 2007, AKP mengalami peningkatan suara menjadi 46,6 persen di mana jumlah ini merupakan dua kali lipat dari suara partai CHP yang merupakan representasi partai sekuler yang melanggengkan ideologi Kemal Ataturk. AKP mendefinisikan diri sebagai partai “konservatif demokratis”, bukan sebagai partai Islamis. Namun banyak pengikut Kemal Ataturk mencurigai AKP memiliki agenda Islam secara tersembunyi dan ini merupakan ancaman bagi ideology sekularisme Turki (Rabasa & Larrabee, 2008).

Partai AKP sebagai representasi gerakan politik Islam mempunyai basis dukungan politik yang luas, bukan hanya Islam tetapi juga non Islam. Basis AKP juga berasal dari berbagai kelas dan wilayah. AKP menjalin hubungan yang erat dengan konstituen lokalnya, sehingga mendapat dukungan yang kuat dari kelompok-kelompok miskin dan marginal yang jumlahnya terus bertambah di wilayah perkotaan. Pada saat yang sama, kebijakan ekonomi liberal AKP telah mengintegrasikan perusahaan-perusahaan lokal ke dalam ekonomi global. Komitmen AKP terhadap reformasi demokrasi, dan kebijakan-kebijakannya yang sangat toleran terhadap minoritas juga menjadi faktor meningkatnya dukungan dari kelompok-kelompok tersebut terhadap partai AKP (Rabasa & Larrabee, 2008).

Hagia Sophia dan Gerakan Politik Islam di Turki

Gerakan Islam didefinisikan dan dikategorikan dalam bermacam-macam bentuk. Karawan (1997) mengkategorikan gerakan Islam sebagai gerakan militant dan politik; El Said (1995) melihat gerakan Islam sebagai gerakan pragmatis dan ideologis; Ghadbian (1997) melihat dari dua kutub yaitu radikal dan moderat; Zubaida (2001) membuat tiga kategori gerakan Islam yaitu konservatif, radikal, dan politik; Eickelman (2000) membagi dalam dua kelompok yaitu reformis dan tradisional. Pada tahun 1900-an gerakan atau aktivisme Islam di Negara-negara seperti Turki dan Aljazair menuju ke arah politik electoral, yaitu dengan mendirikan partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum. Sejak saat itu, gerakan Islam menunjukkan adanya keragaman,

kompleksitas, dan daya tariknya sebagai gerakan sosial dan politik (Esposito dan Burgat, 2003) (Delibas, 2009).

Gerakan Islam Turki muncul sebagai gerakan akar rumput sebagaimana gerakan lain di Negara-negara Islam, seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan Jamaat-i-Islami di Pakistan. Gerakan-gerakan ini memiliki orientasi politik yang kuat dan menggunakan definisi dari Casanova (1994 : 61), “*we can conceptualize political Islam also as a manifestation of “public religion”*”. Kebangkitan *Welfare Party* (WP) dan *Virtue Party* (VT) di Turki sering dianggap sebagai penanda kebangkitan fundamentalisme Islam di Turki, begitu juga dengan munculnya tokoh Islamis dan *voters* (pemilih) yang dianggap sebagai ekstrimis religius atau fundamentalis. Namun, pada dasarnya kebangkitan politik Islam di Turki berbeda dengan gerakan Islam lainnya seperti Hamas maupun Hizbullah. Tokoh politik Islam Turki seperti Necmettin Erbakan dan pendukungnya berasal dari kalangan profesional dan bisnis dan tidak memiliki latar belakang ulama. Erbakan, misalnya, lulus dari salah satu universitas di Jerman dan merupakan seorang Profesor dalam bidang teknik. Selain itu, gerakan politik Islam seperti *National Salvation Party* (NSP) maupun *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) belum menghasilkan pemikir-pemikir Islam seperti Jamaludin Al Afghani atau Ayatullah Khomeini. Gerakan politik Islam di Turki berkembang terus menerus sebagai konsekuensi dari proses modernisasi dan sekularisasi yang telah berlangsung sejak 1920-an. Göle menyatakan bahwa gerakan Islam dalam formasi ideologis dan praktik sosiologis telah menciptakan hibridisasi baru antara tradisi dan modernitas, agama dan sekularisme, serta komunitas dan agama (Delibas, 2009).

Turki merupakan jembatan antara Barat yang demokratis dan Timur yang Islamis. Kebangkitan gerakan Islam di Turki dapat diidentifikasi dari kebijakan-kebijakan domestik maupun kebijakan luar negerinya. Salah satu kebijakan domestik Erdogan yang terbaru adalah pengalihfungsian Hagia Sophia sebagai masjid. Keputusan ini banyak didukung oleh masyarakat Turki. Melalui survei yang dilakukan oleh Optimar pada 10-14 Juli diketahui, 60 persen warga Turki mendukung keputusan perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada bulan Juni, dari 48,2 persen menjadi 60 persen. Hanya 27 persen masyarakat yang mendukung Hagia Sophia tetap menjadi museum. Sementara, tidak ada yang menghendaki jika Hagia Sophia dijadikan gereja.(Antonopoulos, 2020)

Keputusan Erdogan dapat dipahami sebagai langkah politiknya untuk mengembalikan politik Islam dan mendapat dukungan dari masyarakat Turki dan masyarakat Islam secara global. Hasil survei oleh Hurriyet menunjukkan, sebanyak 38,4 persen masyarakat akan memilih Erdogan bila diadakan pemilu sekarang, hanya 7 persen untuk Imamoglu, 5,6 persen untuk Aksener, 4,7 persen untuk Kurdi Selahattin Demirtas, dan 4 persen untuk walikota Ankara, Mansur Yavas.(Antonopoulos, 2020) Salah satu orang yang setuju dengan keputusan Erdogan untuk menghidupkan lagi politik islam adalah Orhan Pamuk, seorang novelis. Ketika diwawancarai oleh BBC, ia mengatakan bahwa perubahan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid adalah pernyataan

kepada dunia bahwa masyarakat Turki tidak ingin sekuler lagi, meskipun banyak masyarakat yang senang dengan status Hagia Sophia sebagai museum. (“Hagia Sophia: Former Istanbul Museum Welcomes-Muslim-Worshippers,” 2020)

Selain mendapat dukungan dari masyarakat Turki, keputusan Erdogan banyak mendapat pujian dari pemimpin muslim, diantaranya: Allahshukur Pashadeh (Ketua Dewan Agama Kaukasus) yang memberi selamat atas pengalihfungsian Hagia Sophia, sementara Rateb Jneid (Kepala Federasi Dewan Islam Australia) menyampaikan dukungannya atas keputusan Turki. Shaqir Fetahu, wakil ketua Persatuan Agama Islam Republik Makedonia, dalam suratnya menulis bahwa kepemimpinan Erdogan adalah bintang yang sedang naik daun dan sumber harapan bagi umat islam dan mereka yang tertindas. Dalam surat atas nama Dewan Komunitas Agama Muslim Lithuania, Mufti Aleksandras Beganskas Lithuania menyampaikan pihaknya percaya bahwa Hagia Sophia akan menjadi simbol monoteisme yang akan merangkul semua umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, ras, dan sekte dibawah dewan presidensi urusan agama Turki.(Agency, 2020)

Kebijakan Erdogan untuk mengalihfungsikan Hagia Sophia sebagai masjid memperkuat gerakan politik Islam di Turki, walaupun kebijakan ini ditentang oleh para sekuleris Turki. Kebijakan ini akan memperkuat posisi Erdogan dan AKP sebagai partai pemerintah. Komitmen AKP terhadap reformasi demokrasi, dan kebijakan-kebijakannya yang sangat toleran terhadap minoritas juga menjadi faktor meningkatnya dukungan dari kelompok-kelompok tersebut terhadap partai AKP. Begitu juga dengan kebijakan Erdogan dalam melakukan reformasi pemerintahan berdasarkan Islam akan mendapat dukungan bagi kelompok Islamis yang sudah lama menginginkan Turki kembali pada kehidupan yang Islami. Karena kebijakan sekularisme yang diusung oleh Mustafa Kemal Ataturk telah mengekang kebebasan dalam beragama serta mencerabut Islam yang sudah lama mengakar secara ideologis maupun sosial di masyarakat.

Simpulan

Keputusan Erdogan mengalihfungsikan Hagia Sophia sebagai masjid ini mendapat respon dari berbagai pihak di dunia, mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat umum. Sebagian Negara yang mayoritas berpenduduk Muslim mendukung keputusan otoritas Turki mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Sejumlah organisasi Muslim seperti Uni Magrib Arab (The Magrib Arab Union), Ikhwanul Muslimin mendukung keputusan tersebut. Di samping dukungan, keputusan ini juga mendapat kritik dan kecaman baik secara nasional maupun internasional. Dari dalam negeri, perdebatan tentang keputusan ini menyentuh inti perpecahan antara pihak agama dan pihak sekuler di Turki. Kelompok-kelompok nasionalis-konservatif di Turki telah lama ingin berdoa di Hagia Sophia yang merupakan bagian dari warisan Kesultanan Ottoman. Sementara bagi kelompok sekuler, Hagia Sophia harus tetap menjadi museum sebagai symbol solidaritas Kristen dan Muslim.

Kebijakan Erdogan ini merupakan satu dari langkah-langkah Erdogan dalam melakukan Islamisme di Turki. Pasca runtuhnya kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk, gerakan-gerakan Islam di Turki muncul secara berkesinambungan. Dimulai dari gerakan tokoh Islamisme Turki Necmettin Erbakan yang memenangkan pemilu pada tahun 1996 hingga Abdullah Gül dan Recep Tayyip Erdogan yang mendirikan Partai Keadilan Pembangunan/ *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) pada 14 Agustus 2001. Pendirian partai ini mendapat apresiasi dari masyarakat Turki, terlihat dari keberhasilan AKP dalam memenangkan pemilihan umum pada tahun 2002. Gerakan Islamisme Turki merupakan representasi sebagian besar masyarakat Turki yang menginginkan Islam sebagai akar kehidupan masyarakat, baik secara ideologis maupun sosiologis. Walaupun sebagian pengikut Kemal masih terus berupaya menjaga warisan sekularisme Turki. Gerakan politik Islam di Turki berkembang terus menerus sebagai konsekuensi dari proses modernisasi dan sekularisasi yang telah berlangsung sejak 1920-an. Gerakan Islam ini dalam formasi ideologis dan praktik sosiologis telah menciptakan hibridisasi baru antara tradisi dan modernitas, agama dan sekularisme, serta komunitas dan agama.

Daftar Pustaka

- Agency, A. (2020). Muslim leaders praise Ankara's decision on Hagia Sophia Mosque.
- Antonopoulos, P. (2020). 60% of Turkish Citizens Support Hagia Sophia Conversion. Retrieved from <https://greekcitytimes.com/2020/07/23/60-of-turkish-citizens-support-hagia-sophia-conversion/?amp>
- Azak, U. (2010). *Islam and Secularism in Turkey*. London: I.B Tauris & Co Ltd.
- Berkes, N. (1963). *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: McGill University Press.
- Delibas, K. (2009). Conceptualizing Islamic Movements : The Case of Turkey. *International Political Science Review*, 3(1), 89–103.
- Erdogan Resmi Jadikan Hagia Sophia sebagai Masjid. (2020). Retrieved September 25, 2020, from <https://tirto.id/erdogan-resmi-jadikan-hagia-sophia-sebagai-masjid-fP8J>,
- Hagia Sophia : Salat Jum'at Pertama Setelah 86 Tahun. (2020). Retrieved September 25, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/bahasa-inggris-53531276>
- Hagia Sophia: Former Istanbul Museum Welcomes-Muslim-Worshippers. (2020). Retrieved September 25, 2020, from <https://www.bbc.com/news/amp/world-europe-53506445>
- Hasan, A. M. (2018). Runtuhnya Kekhalifahan Islam Terakhir. Retrieved September 25, 2020, from <https://tirto.id/runtuhnya-kekhalifahan-islam-terakhir-cFuL>
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2015). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*.

Jakarta: Prenada Media Group.

- Isputaminingsih. (2014). Sejarah Islam : Kasus Sekularisme Turki. *Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah UNSRI*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/4753>
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia UIN Sunan Kalijaga*, 6(1). Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1444/1250>
- Murwati, D. (2009). *Industri Pariwisata Turki*. Universitas Indonesia. Retrieved from [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127268-RB07D181i-Industri pariwisata-Analisis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127268-RB07D181i-Industri%20pariwisata-Analisis.pdf)
- Mustofa, I. (2016). Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam : Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2893/2141>
- Nofrianti, M., & Muslim, K. L. (2019). Kemajuan Islam pada Masa Kekaisaran Turki Usmani. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 3(1). Retrieved from <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/1331>
- Puspitarini, R. C. (2020). *Kajian Kebijakan Politik Internasional: Metode, Teori & Studi Kasus*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rabasa, A., & Larrabee, F. S. (2008). *The Rise of Political Islam in Turkey*. California: RAND National Defense Research Institute.
- Robinson, D. (2011). *The Rise of Islam in Turkey: Opportunity or Obstruction for the West?* Retrieved from <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a545432.pdf>
- Sejarah Hagia Sophia, Museum yang Dijadikan Masjid oleh Erdogan. (2020). Retrieved September 8, 2020, from <https://tirto.id/sejarah-hagia-sophia-museum-yang-dijadikan-masjid-oleh-erdogan-fQVy>
- Solikhun. (2013). *Negara Turki pada Masa Kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk Tahun 1923-1950*. Universitas Indonesia. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-3/20352001-MK-Solikhun.pdf>
- Turki dan Yunani Saling Sindir Usai Salat Jumat di Hagia Sophia. (2020). Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1369340/turki-dan-yunani-saling-sindir-usai-salat-jumat-di-hagia-sophia/full&view=ok>
- Yavuz, M. H. (2003). *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press.

This page is intentionally left blank